**ABSTRAK**

Penyebaran informasi Hoax sudah sangat marak terjadi dimana-mana, ini tentunya dapat berpengaruh bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu pemerintah Kota Palembang mengeluarkan surat keputusan walikota palembang nomor 265 tahun 2017 tentang program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Laporan akhir yang penulis buat adalah tentang “ Peranan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pelaksanaan Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan” Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik reduksi data sebagai kerangka untuk menganalisa permasalahan yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kepala Dinas selaku ketua pelaksana program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sudah cukup baik namun masih ada hambatan yaitu masih minimnya anggaran untuk menjalankan program, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta sangat kurangnya motivasi anggota dalam menjalankan program ini.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak mengikat, mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis pada anggota dan sosialisasi kepada masyarakat serta merencanakan memberikan uang kesejahteraan pada anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Saran Penulis yaitu pengadaan sosialisasi untuk masyarakat dan Bimbingan teknis kepada anggota perlu dilakukan secara intensif dengan narasumber yang berkualifikasi, memprioritaskan kerjasama dengan pihak luar, memberikan tambahan motivasi anggota dengan contoh membagikan seragam khusus anggota.

Kata Kunci: peran kepala dinas, pelaksanaan program kelompok

 informasi masyarakat